

BAB IV

ALASAN INDONESIA MEMILIH KOREA SELATAN SEBAGAI PARTNER KERJASAMA PEMBUATAN ALUTSISTA

Dalam mempertimbangkan untuk menentukan kerjasama pertahanan, kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan buatan serta kondisi sosial termasuk kemampuan keuangan negara menjadi faktor yang penting. Faktor penting lainnya yaitu seperti penguasaan teknologi terutama di bidang alat utama sistem senjata (alutsista), ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara serta perkembangan konteks strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jumlah penduduk yang banyak serta luasnya wilayah laut dan darat yang dimiliki Indonesia tidak seimbang dengan jumlah maupun jenis alutsista yang dimilikinya untuk melakukan pengamanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengembangan alutsista, apalagi saat ini hampir seluruh kekuatan alutsista yang dimiliki TNI tidak sanggup beroperasi secara maksimal. Hal ini dikarenakan faktor usia peralatan dan terbatasnya anggaran untuk pengadaan alutsista.

Dalam memilih Korea Selatan sebagai partner kerjasama pembuatan alutsista, Indonesia memiliki beberapa alasan atau kepentingan. Sesuai dengan kepentingan Indonesia untuk memodernisasi peralatan militer dalam negeri, dan membangun kemandirian industri pertahanannya sehingga tidak bergantung pada satu negara saja serta ingin melakukan kerjasama militer dengan biaya yang lebih murah, Korea Selatan merupakan pilihan yang tepat sebagai partner kerjasama. Hal ini dikarenakan Korea Selatan menawarkan kerjasama yang sesuai dengan kepentingan Indonesia, yaitu dengan adanya *Transfer of Technology*, sistem pendanaan yang murah, tidak adanya ancaman embargo, dan tidak adanya sentimen negatif dari Amerika.

A. Adanya *Transfer of Technology*

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus memodernisasi peralatan pertahanannya. Hal ini dikarenakan salah satunya karena letak geografis Indonesia yang membuat Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman keamanan. Dengan meningkatnya jumlah arus pelayaran yang melewati perairan Indonesia maka akan berdampak terhadap masalah lingkungan hidup, sumber daya alam dan ancaman keamanan maritim itu sendiri (Sir, 2017).

Indonesia juga masih memiliki masalah dalam pengelolaan lingkungan keamanan laut. Dalam mengelola lingkungan laut, tidak hanya melindungi perairan dari pencemaran laut seperti tumpahan minyak namun juga meliputi koordinasi dengan pihak TNI AL supaya perairan aman dari gangguan keamanan seperti penyelundupan dan pencurian ikan, perompakan laut. Karena hal tersebut dapat merugikan perekonomian dan pertahanan laut nasional.

Adanya gangguan keamanan laut ini membuat Indonesia mengalami kerugian keuangan yang sangat besar. Menurut data dari Departemen Pertahanan, menunjukkan kerugian sebesar US \$ 2 milyar pertahunnya dari pencurian ikan, US \$ 1 milyar dari penyelundupan melalui alur laut nasional, Rp 2 triliun dari eksploitasi dan penggalian pasir gelap dan Rp. 30 triliun dari penjarahan hutan (*illegal logging*) (Perwita & Bandoro, 2012).

Dari catatan yang dikeluarkan International Maritime Bureau (IMB), perampokan kapal di kawasan Selat Malaka, cenderung mengalami peningkatan yang drastis sejak tahun 1999. Jumlah perampokan yang terjadi di Selat Malaka dalam wilayah laut Indonesia adalah 113 dari 285 kasus atau 39,6% dari jumlah total kasus yang dilaporkan. IMB juga melaporkan adanya tingkat kekerasan yang semakin meningkat seiring

dengan jumlah kasus perampokan laut. Dari 325 kasus pembajakan yang terjadi pada tahun 2004, 93 diantaranya terjadi di Indonesia dan 37 kasus di selat Malaka. Sedangkan pada tahun 2005, dari 56 kasus di dunia, 16 kasus pembajakan diantaranya terjadi di Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai rangking pertama dari semua kasus kriminalitas laut di seluruh dunia (Perwita & Bandoro, 2012).

Gangguan keamanan di laut ini merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Selain itu, tindakan pelanggaran wilayah baik laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh Negara lain juga merupakan sebuah ancaman tersendiri. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara seperti pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan. Pada 30 Juni 2015 pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara Indonesia jatuh dan menewaskan ratusan penumpangnya di Medan. Kondisi militer Indonesia sangatlah memprihatinkan karena banyak peralatan militer yang sudah dalam kondisi tua. Hal ini menandakan bahwa sistem alutsista di negeri ini harus diperbarui.

Indonesia memang telah menjalin kerjasama militer dengan Negara-negara dengan kekuatan militer besar seperti Amerika, Rusia, dan China. Kerjasama militer yang dilakukan seperti pembelian senjata-senjata militer. Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari ketergantungan dengan negara lain jika Indonesia terus menerus melakukan pembelian alutsista. Jika pembelian terus menerus dilakukan (tidak memproduksi sendiri), maka kekuatan Indonesia tidak akan bisa sama dengan Negara produsen. Negara Produsen akan terus mendikte kekuatan pertahanan Indonesia karena

kekuatan pertahanan Indonesia akan sangat mudah terdeteksi (Karim, 2014).

Negara-negara produsen alutsista dunia (seperti Amerika, Rusia dan China) mempunyai kepentingan untuk mengontrol produk yang mereka jual. Juga kepentingan agar kekuatan militer Negara pembeli tidak membahayakan bagi aliansi mereka. Oleh karena itu, pembelian alutsista juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam konteks kemandirian, Mandiri dalam membeli berarti suatu Negara berhak membeli alutsista tanpa tekanan atau didikte Negara lain. Kemandirian membeli ini menjadi penting bagi Negara seperti Indonesia yang tidak masuk aliansi pertahanan mana pun di dunia. Persoalan transfer teknologi menjadi catatan penting dalam kemandirian dalam membeli. Negara produsen atau importir cenderung menyimpan dan membatasi transfer teknologi. Atas dasar itu, jika suatu Negara ingin mencapai kemandirian industri pertahanan, kepemilikan (*ownership*) atas teknologi dan kemampuan (*capacity*) dalam riset serta pengembangan teknologi menjadi syarat yang wajib dipenuhi, sambil meneruskan opsi kebijakan lain, yakni kerjasama pertahanan di bidang produksi bersama (*joint production*) atau penerapan kebijakan offset serta transfer teknologi (Karim, 2014).

Penguasaan teknologi dalam sistem pertahanan merupakan sesuatu yang harus selalu diperhatikan Indonesia. Penyelenggaraan sistem pertahanan di Indonesia harus mengupayakan penguasaan dan peningkatan teknologi pertahanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Kekuatan pertahanan Indonesia akan lebih diperhitungkan jika Indonesia dapat menguasai aspek teknologi dengan baik. Aspek teknologi telah memengaruhi perkembangan sejarah militer dunia selama berabad-abad dan semakin hari akan semakin meningkat pengaruhnya.

Teknologi akan menjadi factor penting yang menunjang kekuatan pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, melalui penguasaan teknologi, kekuatan pertahanan Indonesia akan semakin meningkat . Penguasaan teknologi inilah yang harus segera diupayakan.

2. Penguasaan teknologi modern bisa mengubah struktur, postur, bahkan strategi pertahanan suatu Negara. Penguasaan teknologi yang maju bisa mempengaruhi hal tersebut. Semakin maju teknologi yang dikuasai , maka penentuan struktur, postur, dan strategi pertahanan akan semakin efisien dan semakin memperkuat pertahanan Negara (Karim, 2014).

Dalam kerjasama pertahanannya dengan Korea Selatan, Indonesia akan memperoleh *Transfer of Technology*, pada kerjasama pesawat tempur KFX/IFX terdapat 4 teknologi utama yang akan ditransfer yaitu *Active electronically scanned array* (AESA) radar, *infrared search and track* (IRST), *electronic optics targeting pod* (EOTGP), dan *Radio Frequency Jammer* (Suhada, 2017). *Active electronically scanned array* (AESA), juga dikenal sebagai *active phased array radar* (APAR) adalah jenis radar array bertahap yang fungsi pemancar dan penerima (*transceiver*) terdiri dari banyak *transmit/receive modules* (TRMs). AESA radar mengarahkan sorot mereka dengan memancarkan gelombang radio yang terpisah dari setiap modul yang mengganggu konstruktif pada sudut tertentu di depan antena. Sedangkan *infrared search and track* (IRST) yaitu sistem pencarian dan pelacakan inframerah, digunakan untuk mendeteksi dan melacak objek yang melepaskan radiasi inframerah seperti pesawat jet dan helikopter. Sistem yang digunakan bersifat pasif seperti kamera termografi, yang berarti mereka tidak memberikan radiasi apapun, tidak seperti radar. Hal ini merupakan keunggulan dari IRST karena akan sulit terdeteksi. *Electronic optics targeting pod* (EOTGP)

merupakan alat penunjuk target yang digunakan oleh pesawat berfungsi untuk membantu mengakuisisi target *high value* di darat. Pada awalnya Korea Selatan akan bekerjasama dengan perusahaan milik Amerika yaitu Lockheed Martin untuk mendapatkan keempat teknologi inti tersebut. Namun, Amerika malah menolak untuk mentransfer keempat teknologi tersebut. Kemudian Korea Selatan bekerjasama dengan Eropa untuk mendapatkan teknologi inti tersebut. Nantinya keempat teknologi tersebut akan ditransfer ke Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam proyek pengembangan pesawat tempur, beberapa ahli dari Indonesia juga diberangkatkan ke Korea Selatan untuk mendapat pelatihan dalam pembuatan pesawat, para ahli dari Indonesia ini nantinya akan memperoleh ilmu tentang teknologi inti pesawat tempur tersebut. Begitu pula dengan kerjasama dalam pembuatan kapal selam, PT PAL Indonesia telah mengirimkan 112 insinyur ke DSME Korea Selatan, nantinya diharapkan para insinyur tersebut dapat melibatkan diri dalam transfer pengetahuan dan pembelajaran serta pengembangan kapal selam secara mandiri melalui tahap *on the job training (OJT)*. Pada 36 bulan pertama, mereka hanya akan memperhatikan cara membuat kapal selam. Para teknisi Indonesia akan memperhatikan dengan saksama cara merakit hingga akhirnya kapal selam itu selesai. Pada pembuatan kapal selam kedua, barulah para teknisi itu ikut turun. Namun masih akan dibantu oleh pihak Korea Selatan. Produsen kapal selam Korea Selatan nantinya juga akan membagi ilmunya dan datang ke Indonesia untuk membimbing PT PAL Indonesia untuk membuat kapal selam ketiga, setelah sebelumnya kapal selam pertama telah dibuat di Korea Selatan oleh kedua Negara dan kapal selam kedua sedang dalam tahap pengerjaan di Korea Selatan. Dalam kerjasama kapal selam ini, teknologi yang ditransfer yaitu seperti *Latest Combat System, Enhanced Operating System* dan *Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accommodation* (Destrianita, 2016). Teknologi-teknologi ini

nantinya diharapkan dapat dikuasai oleh para ahli Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan.

Indonesia pernah menerima embargo senjata dari Amerika. Banyaknya peralatan militer yang didominasi oleh produk buatan Amerika tersebut mengakibatkan ketergantungan sistem pertahanan udara terhadap Amerika. Selain itu pada saat Indonesia mengalami embargo, berbagai persoalan bangsa juga sedang menghadang, antara lain pergolakan dan penanganan bencana tsunami di Aceh. Dengan kondisi alutsista yang tingkat kesiapannya rendah, kekuatan bersenjata Indonesia menemui berbagai kendala untuk mengatasi berbagai persoalan kedaulatan secara cepat. TNI pada saat itu mengalami kendala mobilisasi akibat tidak siapnya pesawat-pesawat angkut milik TNI AU, seperti dalam kasus operasi penanganan bencana tsunami di Aceh. Kemandirian dalam perawatan alutsista merupakan suatu hal yang penting, terutama ketika mengandalkan berbagai alutsista dari luar negeri. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pembelian suatu produk pertahanan, terutama alutsista, dibarengi dengan ketersediaan suku cadang dan bantuan pemeliharaan. Meskipun Amerika telah mencabut embargonya, hal ini tidak menutup Indonesia untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Negara lain, seperti Rusia, China dan Korea Selatan.

Amerika juga enggan melakukan *Transfer of Technology*, Amerika bahkan mengurangi beberapa fungsi dari peralatan tempur yang dibeli karena takut kalah saing. Seperti yang dikatakan diatas bahwa negara produsen atau importir cenderung menyimpan dan membatasi transfer teknologi. Berbeda halnya dengan Rusia dan China, dalam kerjasama pertahanan dengan Indonesia, Rusia dan China juga menawarkan adanya *Transfer of Technology* , namun kerjasama tersebut memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya seperti sentiment negative dari Amerika yang dapat mengakibatkan embargo. Ketika

Indonesia sedang membutuhkan partner dalam upaya pengembangan alutsistanya, Korea Selatan datang dan menawarkan kerjasama dalam proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dan pembuatan kapal selam.

Jika Indonesia berhasil mewujudkan cita-citanya untuk memiliki industri pertahanan yang maju dan mandiri, maka Indonesia akan memiliki beberapa keuntungan yaitu keuntungan ekonomi, keuntungan pendapatan pajak, keuntungan lapangan kerja, keuntungan teknologi, dan keuntungan Sumber Daya Manusia yang ahli. Industri pertahanan yang maju diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana industri manufaktur, yang selama ini mampu menjadi penyumbang terbesar PDB Indonesia. Indonesia juga bisa memanfaatkan industri pertahanan sebagai salah satu komoditas ekspor yang bisa menyumbangkan devisa bagi Negara. Pasar senjata dan peralatan pertahanan di dunia masih terbuka luas. Selama ini Indonesia berperan sebagai importir dalam industri pertahanan, namun jika Indonesia bisa memaksimalkan industri pertahanannya maka Indonesia dapat menjadi eksportir alat-alat pertahanan.

Dengan berkembangnya industri pertahanan di dalam negeri, hal ini akan memberikan manfaat untuk Negara, termasuk manfaat dari pajak yang disetorkan kepada Negara. Selain itu juga akan memperluas ketersediaan lapangan kerja. Karena di Indonesia persoalan pengangguran menjadi masalah besar. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun belum seluruhnya dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang ada.

Selain itu, Indonesia juga akan memperoleh keuntungan teknologi. Teknologi merupakan aspek yang bisa membedakan kemampuan pertahanan suatu Negara dengan Negara lain. Jika penguasaan teknologi bisa dilakukan oleh para pelaku industri pertahanan di Indonesia, hal ini akan

menjadi keuntungan besar bagi kekuatan pertahanan Indonesia. Dengan berkembangnya penguasaan teknologi maka akan memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk keunggulan peralatan pertahanan dibandingkan dengan Negara lain. Hal ini terbukti dengan adanya Negara-negara maju yang mempunyai pelaku industri pertahanan yang juga maju dan menguasai teknologi canggih.

Kemandirian industri pertahanan juga akan membuat Sumber Daya Manusia menjadi ahli di bidang industri pertahanan. SDM ahli ini akan muncul seiring dengan berkembangnya industri pertahanan yang semakin maju. Industri pertahanan yang semakin maju dan berkembang akan memberikan ruang kepada para peneliti dan ilmuwan untuk berkarya di negeri sendiri. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah masih lambatnya perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini mengakibatkan para pelaku industri pertahanan di dalam negeri belum bisa menampung SDM berkualitas yang telah belajar secara formal di Negara-negara maju (Karim, 2014). Kemandirian dalam membuat alat-alat pertahanan sendiri adalah tujuan besar yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Meski kemandirian total sulit dicapai, namun langkah menuju kemandirian industri pertahanan tidak boleh surut.

B. Sistem Pendanaan yang Murah

Kondisi geografis Indonesia yang strategis tentunya memiliki potensi ancaman yang kedepannya akan semakin kompleks. Namun, disisi lain industri pertahanan Indonesia belum kuat. Salah satu upaya negara dalam membangun ketahanan alutsista yaitu dengan menyediakan dan melengkapi secara berkelanjutan persenjataan bagi pasukan militer untuk melindungi seluruh warga negara beserta asset negara. Untuk memenuhi kebutuhan alutsista dibutuhkan anggaran yang sangat besar, mengingat peralatan militer sangat mahal, semakin tinggi teknologi persenjataan semakin dibutuhkan

anggaran yang lebih besar. Anggaran pertahanan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan pertahanan nasional yang kuat, diperlukan prasyarat anggaran militer yang mencukupi. Anggaran pertahanan yang dikeluarkan tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing Negara.

Di awal kemerdekaannya, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Indonesia berusaha menarik perhatian dunia internasional dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Barulah pada tahun 1960-an Negara-negara barat mulai tertarik dan menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Dengan letak strategisnya yang berada di jalur sutra, banyak para pedagang singgah dan memilih menetap di Indonesia karena melihat peluang ekonomi yang semakin maju di jalur sutra Indonesia. Para pedagang ini tentunya membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sedikit demi sedikit pengangguran di Indonesia dapat teratasi dan masyarakat Indonesia semakin aktif dalam dunia perdagangan. Namun, pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dollar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita yang sangat drastis. Inflasi terjadi dimana-mana, banyak perusahaan asing dan pribumi yang hampir bangkrut atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998, dan terpaksa memberhentikan karyawannya karena tidak sanggup membayar upah. Pemerintah tidak dapat berbuat banyak, karena krisis pada tahun itu jauh lebih parah dan kompleks. Kerusakan Mei 1998, mengakibatkan kehancuran di berbagai sektor ekonomi, sosial, maupun politik.

Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia mulai mengalami perkembangan yang berarti. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat seiring pemulihan ekonomi pasca peristiwa krisis global yang terjadi

sepanjang 2008-2009. Hal ini ditandai dengan perekonomian Indonesia yang mampu bertahan di tengah ancaman pengaruh dari krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di benua Eropa. Indonesia kini telah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan perekonomian Indonesia.

Berbagai pencapaian dalam bidang ekonomi membuat Indonesia semakin mantap melangkahkan kaki untuk menjalin kerjasama internasional. Berbagai tawaran kerjasama internasional dari Negara lain terus berdatangan. Hal ini merupakan suatu keberhasilan yang telah lama dicita-citakan Indonesia. Namun, Indonesia masih memiliki hutang luar negeri yang entah sampai kapan akan berakhir. Kondisi keuangan Negara yang belum stabil, serta desakan pembayaran hutang luar negeri yang mengambil porsi cukup besar menjadikan pemenuhan anggaran pertahanan terbatas. Pemenuhan anggaran pertahanan menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia, yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Jumlah anggaran pertahanan di Indonesia kurang-lebih Rp. 87 triliun pada 2014. Angka ini hanya 0,8 dari besaran PDB Indonesia, namun jika dilihat dari kecenderungan beberapa tahun terkahir, anggaran pertahanan Indonesia sudah mengalami kenaikan. Negara-negara anggota NATO rata-rata memiliki anggaran pertahanan 2 persen dari PDB. Jika anggaran pertahanan Indonesia bisa mencapai 2 persen dari PDB, maka ada ruang untuk terus tumbuh. Tetapi sebelum angka 2 persen dari PDB tersebut bisa dicapai, industri pertahanan harus disiapkan sedini mungkin. Hal ini dikarenakan agar ketika anggaran pertahanan Indonesia bisa mencapai angka 2 persen dari PDB, uang tersebut tidak mengalir ke negara lain untuk membeli berbagai alutsista.

Meski anggaran pertahanan Indonesia memiliki kenaikan, namun sebagian besar anggaran pertahanan tersebut masih digunakan untuk keperluan operasional, pemeliharaan

alat, dan belanja pegawai. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu mengembangkan industri pertahanannya sendiri, uang negara akan banyak mengalir ke negara lain yang punya kemampuan memproduksi alutsista.

Jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara lain, terutama negara-negara maju, Indonesia masih dalam posisi tertinggal. Bahkan Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Anggaran pertahanan Indonesia yang hanya sekitar 0,8 persen dari total PDB masih jauh dari Singapura yang mencapai 3 persen dan Malaysia yang sudah 2 persen. Meski mengalami peningkatan, namun anggaran pertahanan Indonesia masih kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu sangat disayangkan jika Indonesia terus membeli alutsista dari negara lain. Untuk menciptakan industri pertahanan yang lebih baik, Indonesia berupaya untuk mengembangkan alutsistanya sendiri (Karim, 2014).

Oleh karena itu, dalam upaya untuk membangun industri pertahanannya, Indonesia cenderung mencari partner kerjasama pertahanan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Maka dari itu, Korea Selatan merupakan pilihan yang tepat sebagai partner kerjasama. Karena dalam kerjasama tersebut pendanaannya tergolong murah. Dalam kerjasama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX, pemerintah Korea akan menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, Korean Aerospace Industry sebuah perusahaan swasta milik Korea Selatan menanggung 20 persennya, dan pemerintah Indonesia akan menanggung 20 persen. Dengan rincian dana sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rincian Dana Pesawat Tempur KFX/IFX

Total Dana	Indonesia (20%)	Korea Selatan (60%)	Korean Aerospace Industry (20%)
US\$ 8 miliar	US\$ 1,8 miliar	US\$ 4,4 miliar	US\$ 1,8 miliar

Sumber : detikFinance.com

Dalam kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan 50 pesawat yang mempunyai kemampuan tempur melebihi F-16, sementara 150 pesawat untuk Korea Selatan. Indonesia memperoleh banyak keuntungan, karena Indonesia hanya mengeluarkan modal 20% dari total biaya tetapi Indonesia bisa dapat 25% dari total output proyek. Sedangkan Korea Selatan yang mengeluarkan modal 80% dari total biaya hanya mendapatkan 75% dari total jet tempur yang dibuat, dengan kata lain Korea Selatan rugi 5%. Modal atau harga yang dikeluarkan Indonesia dalam kerjasama pesawat tempur ini juga tergolong murah bila dibandingkan dengan Negara lain. Dalam pembelian 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia, Indonesia akan mengeluarkan biaya senilai US \$ 1,14 miliar. Bahkan di China harga untuk 24 pesawat total kontrak senilai sekitar US\$ 2 miliar.

Tabel 4. 2 Harga Pesawat Tempur

Negara	Harga (per unit)
Korea Selatan	US\$ 70-80 juta
Amerika	US\$ 94 juta
Rusia	US\$ 90 juta
China	US\$ 83-85 juta

Sumber: jejaktapak.com

Dalam tabel 4.3 dapat dilihat bahwa harga per unit pesawat tempur KFX/IFX diperkirakan sekitar US\$ 70-80 juta. Sedangkan di Negara lain, harga pesawat tempur dengan kualitas yang hampir sama harganya lebih mahal. Seperti di Amerika, harganya sekitar US\$ 94 juta, di Rusia US\$ 90 juta, dan di China US\$ 83-85 juta (Az, 2017). Oleh karena itu Indonesia memilih Korea Selatan sebagai partner dalam kerjasama pembuatan pesawat tempur.

Serta dalam kerjasama pembuatan kapal selam, Indonesia juga mendapatkan harga yang lebih murah, untuk harga 3 kapal selam dari Korea Selatan harganya sebesar US\$ 1 miliar.

Tabel 4. 3 Perkiraan Harga Kapal Selam

Negara	Harga per unit
Korea Selatan (Chang bogo SSK)	US \$ 466 juta+ToT (standar US \$ 350 juta)
Amerika (Virginia SSN)	US\$ 2,4 miliar
Rusia (Severodvinsk SSBN)	US\$ 1,5 miliar
China (S20)	US\$ 500 juta

Sumber:Jakartagreater.com

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa harga kapal selam dari Korea Selatan lebih murah dibandingkan dengan Negara lain. Meskipun mungkin kapal selam dari Negara lain memiliki spesifikasi yang bagus, namun mengingat anggaran dana yang dimiliki Indonesia masih sedikit, serta kemungkinan ancaman berupa invasi asing relatif kecil, arah dan sasaran pembangunan pertahanan negara bukan untuk memperbesar kekuatan, melainkan dimaksudkan untuk mengatasi ancaman

keamanan yang bersifat mendesak, seperti pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kali ini Indonesia memilih Korea Selatan sebagai partner kerjasama dalam pembuatan kapal selam. Meskipun menawarkan kapal selam dengan harga yang murah, namun Korea Selatan juga memberikan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI Angkatan Laut dan tentunya alih teknologi bagi Indonesia. Kapal selam Chang bogo milik Korea Selatan ini juga sudah termasuk canggih, karena mampu berlayar lebih dari 50 hari dan menampung 41 kru untuk menunjang fungsi. (Puri, 2017). Kapal selam ini juga dipersenjatai torpedo berukuran 533 mm dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ketika Indonesia sedang membutuhkan peralatan militer untuk menjaga keamanan negaranya, namun kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil, Korea Selatan datang membawa solusi bagi Indonesia.

Dalam kerjasama pertahanannya dengan Amerika, Indonesia membeli senjata dengan harga yang cenderung mahal. Amerika sulit melakukan negosiasi atas penjualan semua peralatan militernya, oleh karena itu harga senjata yang dijual Amerika tergolong mahal bagi Indonesia. Selain itu Amerika juga memberikan syarat-syarat yang rumit dalam kerjasama pembelian senjata. Sedangkan dalam kerjasama pertahanannya dengan Rusia dan China, memang pendanaannya lebih terjangkau daripada dengan Amerika, namun kerjasama dengan Korea selatan dinilai lebih murah. Sehingga dalam upaya pengembangan alutsistanya dalam pembuatan pesawat tempur dan pembelian kapal selam, Indonesia memilih Korea Selatan.

C. Tidak Adanya Ancaman Embargo

Embargo yaitu perintah suatu negara untuk membatasi perdagangan atau pertukaran dengan negara tertentu. Biasanya embargo diberlakukan sebagai akibat hubungan politik atau ekonomi yang tidak menguntungkan antar bangsa-bangsa. Pembatasan ditujukan untuk mengisolasi suatu negara dan menciptakan kesulitan untuk kemudian memaksanya untuk bertindak atas suatu masalah mendasar. Embargo akan membatasi semua perdagangan dengan suatu negara, atau bertujuan untuk mengurangi barang-barang tertentu., seperti embargo militer yang ditujukan untuk mencegah pertukaran barang militer dengan suatu negara.

Dalam menjalin kerjasama pembuatan alutsista dengan negara lain, adanya ancaman embargo menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, khususnya bagi Indonesia. Mengingat Indonesia pernah menerima ancaman embargo dari Amerika pada tahun 1999. Pihak yang paling dirugikan ketika embargo terjadi yaitu Angkatan udara karena embargo militer tersebut memutus pasokan suku cadang pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara yang dibeli dari Amerika. Adanya embargo yang diberikan oleh Amerika ini disebabkan karena peristiwa berdarah yang terjadi di Timor-Timur.

Pada saat berakhirnya era perang dingin, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia mengalami tahapan baru dimana isu-isu Hak Asasi Manusia menjadi isu utama. Pemerintah Amerika mulai mempersoalkan isu-isu pelanggaran HAM dan pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia. Hal ini tentunya sangat kontras dengan situasi sebelum Perang Dingin dimana Amerika cenderung menganggap isu pelanggaran HAM sebagai urusan dalam negeri Indonesia, sehingga tidak perlu diintervensi. Selama Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan nasional Amerika, yaitu ancaman komunis Soviet ataupun China terhadap negara-negara di kawasan ASEAN.

Pada era Bush (Presiden Amerika kala itu), kebijakan hak asasi manusia yang diterapkan juga lebih mengutamakan pada pendekatan-pendekatan pribadi yaitu seperti kunjungan diplomat Amerika ke Jakarta yang menyampaikan secara langsung dan pribadi kepada pejabat Indonesia. Bush secara umum tidak menjadikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur sebagai penghambat hubungan kedua negara.

Tetapi sejak Perang Dingin berakhir, atau lebih khususnya sejak Clinton berkuasa di Amerika, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia mengalami perubahan drastis. Sebenarnya, pada tahun terakhir pemerintahan Bush sudah muncul isyarat adanya perubahan serius dalam hubungan kedua negara. Untuk pertama kalinya Amerika bersikap tegas terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Timur. Akibat dari peristiwa ini, Amerika menghentikan bantuan militer dalam bentuk program IMET (*International Military Education and Training*). Sejak tahun 1993, Amerika terus menerus melakukan berbagai tekanan terhadap Indonesia berkenaan dengan kondisi hak asasi manusianya. Amerika juga mengagalkan rencana transaksi penjualan pesawat F-16 (Cipto, 2003).

Perubahan kebijakan Amerika ini disebabkan karena pada era Perang Dingin proses pembuatan kebijakan hak asasi manusia Amerika terhadap Indonesia relatif tidak tergantung pada dukungan Kongres. Carter, Reagan, dan Bush dapat dengan leluasa merumuskan dan menjalankan kebijakan hak asasi manusia tanpa harus memperhatikan tuntutan dan dukungan Kongres, kelompok kepentingan, dan media massa, kecuali Bush pada tahun terakhir masa jabatannya. Namun, ketika berakhirnya Perang Dingin, kondisi domestik yang menguntungkan presiden tersebut mengalami perubahan sehingga membuat Presiden Amerika memerlukan dukungan aktor-aktor diluar eksekutif untuk dapat menjalankan kebijakan hak asasi manusianya. Perubahan lingkungan domestik inilah yang membuat Clinton harus membuat keputusan tentang kebijakan hak asasi manusia Amerika

terhadap Indonesia. Persoalan yang dihadapi buruh diluar Amerika menjadi keprihatinan kaum buruh di Amerika, begitu pula dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menjadi perhatian penuh kalangan aktifis hak asasi manusia di Amerika. Clinton menyatakan bahwa ia akan mengkritik pelanggaran hak asasi manusia dan mengkaitkan bantuan luar negeri dengan prestasi hak asasi manusia negara penerima bantuan luar negeri (Cipto, 2003).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang selama ini menerima bantuan luar negeri dan bekerjasama dengan Amerika di bidang militer akhirnya menerima embargo senjata dari Amerika yang diakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur serta pelanggaran hak-hak buruh. Banyaknya peralatan militer yang didominasi oleh produk buatan Amerika tersebut mengakibatkan ketergantungan sistem pertahanan udara terhadap Amerika dan dampak dari penerapan embargo tersebut mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kemampuan TNI.

Kemudian pasca tragedi 11 September di New York, embargo ini mengendur. Sejak 2002 beberapa lembaga kementerian Amerika meluncurkan inisiatif jutaan dolar untuk Indonesia terkait kepentingan keamanan dan pertahanan. Pemerintah Amerika juga kembali meneruskan program International Military education and Training (IMET), yang sempat terhenti sejak 1999 sampai 2002. Lima tahun kemudian, Kongres mengizinkan secara terbatas akses Indonesia ke hibah dan pinjaman untuk peralatan dan pelatihan militer. Rencana transaksi penjualan pesawat F-16 pun juga dilanjutkan.

Adanya embargo yang diberikan Amerika kepada Indonesia ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri bagi Indonesia. Indonesia kemudian memutuskan untuk tidak menggantungkan peralatan pertahanannya dengan satu negara saja. Oleh karena itu Indonesia ingin menjalin kerjasama pertahanan dengan negara yang tidak menerapkan embargo

dalam kerjasamanya. Negara-negara tersebut seperti Korea Selatan, Rusia, dan China.

Hal ini dikarenakan ketika menjalin kerjasama dengan Korea Selatan, Rusia, dan China, ketiga negara tersebut tidak terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka hanya fokus terhadap kerjasama militer yang mereka lakukan, lain halnya dengan Amerika yang ikut mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Ketiga negara tersebut menyerahkan hak pakai sepenuhnya pada Indonesia atas semua peralatan militer yang dibeli, dan juga tidak mempunyai banyak persyaratan jual beli, tidak seperti Amerika yang penggunaan peralatan militernya harus sesuai syarat dari negaranya. Selama ini dalam melakukan kerjasama militer dengan Korea Selatan, Rusia, dan China, ketiga negara tersebut belum pernah memberikan embargo terhadap Indonesia. Namun, ketika menjalin kerjasama dengan Rusia dan China, Indonesia kemungkinan bisa mendapat embargo. Embargo tersebut tidak datang dari kedua negara itu, tetapi dari pihak ketiga, yaitu Amerika. Hal ini dikarenakan sentimen negatif Amerika terhadap Rusia dan China. Oleh karena itu Indonesia memilih Korea Selatan sebagai partner dalam kerjasama pembuatan alutsista.

D. Tidak Adanya Sentimen Negatif dari Amerika

Sentimen negatif dari negara lain juga perlu diperhatikan jika suatu negara ingin menjalin kerjasama pembuatan alutsista dengan negara lain. Apalagi jika sentimen negatif tersebut datang dari negara dengan kekuatan militer terbesar didunia yaitu Amerika. Sentimen negatif dapat menimbulkan suatu negara akan berperilaku negatif terhadap negara yang tidak disukainya. Untuk menghindari sentimen negatif dari Amerika, Indonesia memilih Korea Selatan sebagai partner kerjasama pembuatan alutsistanya. Hal ini dikarenakan Korea Selatan merupakan salah satu sekutu Amerika. Sedangkan Rusia dan China merupakan rival Amerika.

Hal ini bermula ketika adanya persaingan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet. Seperti yang telah diketahui bahwa terdapat beberapa ideologi yang mendominasi di dunia ini. Kedua ideologi yaitu liberal dan komunis memiliki pengaruh di dunia pada awal abad ke 19. Kedua ideologi ini saling mempengaruhi orang-orang untuk mendapatkan pengikutnya. Karakter liberalis sangat menghargai kebebasan individu, berbeda dengan komunis yang mempunyai sistem yang bercirikan sentralistik. Sekitar abad ke 19, Amerika dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya menganut ideologi tersebut, dimana Amerika memakai ideologi liberalis, dan Uni Soviet memakai ideologi komunis. Kedua negara ini sangat gencar untuk mempengaruhi negara-negara berkembang untuk menganut ideologi mereka.

Uni Soviet mulai menyebarkan ideologinya ke seluruh wilayah Korea. Oleh karena itu Amerika Serikat memutuskan untuk menduduki Korea bagian selatan dalam rangka membendung penyebaran komunis Uni Soviet yang sudah menyebar dikawasan utara. Amerika kemudian membentuk *Republic of Korea* (Korea Selatan) ibu kota di Seoul, sedangkan Uni Soviet membentuk *Democratic people's Republic of Korea* (Korea Utara). Kemudian, pada tanggal 25 Juni 1950, pecahlah Perang Korea yang ditandai dengan invasi pasukan Korea Utara melewati garis parallel 38^0 menuju Korea Selatan. Awalnya, Korea Utara berhasil menduduki Seoul, namun dengan bantuan Amerika dan PBB, Korea Selatan berbalik menjadi unggul. Keadaan perang yang semakin memanas, akhirnya mendorong beberapa pihak untuk mengajukan perundingan untuk menghentikan perang. Pada tahun 1953, Perang korea berakhir yang disepakati dengan penghentian permusuhan yang ditandatangani tanggal 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang kalah maupun menang. Kesepakatan kedua belah pihak tertuang dalam dua poin penting yaitu kedua negara yang berseteru menyepakati secara *de facto* garis parallel 38^0 sebagai garis perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan pihak

yang berseteru juga akan melakukan pertukaran dan pengambilan para tawanan perang ke negaranya masing-masing. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terbaginya Korea menjadi dua yaitu *Republic of Korea* (ROK) atau Korea Selatan dan *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) atau Korea Utara (Wahyura, 2008). Sampai saat ini Korea Selatan masih menjadi sekutu Amerika.

Uni Soviet merupakan salah satu negara adidaya dunia yang sekaligus menjadi rival abadi Amerika. Negara ini merupakan negara komunis teragung sejagat raya pada masanya. Negara ini wajib memberikan perlindungan dan sumbangan materi kepada negara berpaham sosial-komunis yang menjadi bawahannya. Hal ini juga dipicu karena perang dingin dengan Amerika. Dan akhirnya yang menjadi pemenang dari perang dingin tersebut adalah Amerika. Perang dingin yang sudah lama berlangsung itu akhirnya berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Setelah keruntuhan Uni Soviet, kemudian bangsa Rusia memproklamasikan diri sebagai Federasi Rusia. Sampai sekarang, Amerika masih berseteru dengan Rusia dikarenakan perbedaan ideologi tersebut.

Sedangkan China pada saat itu dipimpin oleh kekaisaran dinasti chiing yang pemerintahannya dikuasai oleh kepentingan orang asing. Hal ini kemudian membuat kaum nasionalis marah, kemudian terjadilah pemberontakan dan dinsti chiing berhasil dikalahkan. Tetapi setelah itu justru terjadi kekacauan sendiri oleh para kaum nasionalis. Ketika kekacauan tersebut terjadi, pengaruh komunis mulai masuk ke China. Proses doktrinisasi komunis ke China sangat cepat dan lancar.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Amerika tidak memiliki pesaing yang berarti. Inilah yang membuat Amerika seakan-akan telah berada dipuncak. Namun, kemunculan beberapa negara seperti China yang mengalami lompatan kemajuan yang sangat pesat mengindikasikan akan adanya rivalitas era

baru. China berhasil menjadi negara maju yang membuatnya tak bisa dipandang sebelah mata. Uni Soviet memang telah runtuh, namun sistem ideologinya telah diadopsi oleh China, bahkan digunakan sebagai ideologi negara.

Pasca perang dingin, hubungan Amerika dengan Rusia dan China memang belum selesai sepenuhnya. Saat ini Amerika bahkan tengah berseteru dengan China terkait Laut China Selatan. Amerika dan negara-negara Eropa bahkan juga tengah menjatuhkan embargo ekonomi kepada Rusia, terkait konflik Krimea-Ukraina. Melihat sejarah tersebut tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Rusia dan China. Karena Indonesia bisa mendapat sentimen negatif dari Amerika. Selain karena perbedaan ideologi tersebut, Amerika juga khawatir jika kekuatan militer Indonesia akan sulit ditandingi, karena Rusia juga merupakan negara yang memiliki kekuatan militer besar di dunia, begitu pula dengan China.

Adanya sentimen negatif dari Amerika dapat memicu adanya embargo yang akan diberikan Amerika kepada Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah Amerika telah menyatakan keberatannya terhadap Indonesia yang sedang membeli pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia. Hal tersebut diungkapkan pada pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Amerika. Selain itu Indonesia juga menjalin kerjasama pembuatan rudal anti-kapal C-705 dengan China (Forum militer, 2017) Indonesia bisa saja mendapatkan embargo dari Amerika. Ancaman embargo senjata dari Amerika bisa berakibat fatal. Apalagi Indonesia baru saja menerima sebanyak 24 jet tempur F-16 yang merupakan hibah dari AS (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018). Embargo persenjataan dan suku cadang terhadap F-16 milik Indonesia jelas akan memperpendek usia pakai ke 24 pesawat tempur F-16 tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kurangnya persenjataan yang dimiliki industri pertahanan Indonesia, apabila terjadi embargo tersebut, maka Indonesia

melakukan kerjasama pembuatan alutsista dengan Korea Selatan